

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Daerah melalui APBN. Daerah berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Pemerintah. Sedangkan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan ini dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

#### **A. Tugas Pembantuan Yang Diterima**

##### **1. Dasar Hukum**

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

## **2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan**

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Provinsi Kalimantan Timur mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 bersumber dari 10 (Sepuluh) Kementerian.

Tabel 5.1 Daftar Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

KEMENTERIAN	SKPD PROVINSI	SKPD KABUPATEN/KOTA
Kementerian Dalam Negeri		Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Nunukan
		Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Malinau
Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kab. Berau
	Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau
		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan
		Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat
		Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
		Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Penajam Paser Utara
		Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara
		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kutai Kartanegara
		Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
		Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan
		Dinas Kesehatan Kab. Paser
		Dinas Kesehatan Kab. Bulungan
		Dinas Kesehatan Kab. Berau
		Dinas Kesehatan Kab. Nunukan
		Dinas Kesehatan Kab. Malinau
		Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat
Kementerian Kesehatan	-	

		Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur
		Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara
		Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kertanegara
		Dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung
		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
		Dinas Kesehatan Kota Tarakan
		Dinas Kesehatan Kota Bontang
		Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Nakertrans Kab Bulungan
		Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Nunukan
		Dinas Tenaga Kerja Kab Malinau
		Dinas Sosial Tenaga Kerja Kab. Kutai Barat
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Kutai Timur
		Dinas Tenaga Kerja Kab Penajam Paser Utara
		Dinas Tenaga Kerja, Perindakop, Dan Transmigrasi Kab Tana Tidung
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Samarinda
		Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Balikpapan
		Kantor Tenaga Kerja Kota Tarakan
Kementerian Sosial	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang
Kementerian Kehutanan		Dinas Kehutanan Kabupaten Berau
		Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Berau
		Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Nunukan
Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga) Provinsi Kalimantan Timur	-
Kementerian Lingkungan Hidup	-	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang
Badan Nasional Pengelola Perbatasan	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Nunukan

### 3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp 333.938.642.000,- bersumber dari APBN, menurun 8,56 % dibanding dengan tahun anggaran 2012 yang berjumlah sebesar Rp 365.211.273.000,-.

Tabel 5.2 Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan yang Diterima SKPD  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No.	Kementerian/Lembaga	Anggaran 2012 (Rp)	Anggaran 2013 (Rp)
1.	Kementerian Dalam Negeri	3.845.000.000	4.000.000.000
2.	Kementerian Pertanian	151.778.254.000	115.543.740.000
3.	Kementerian Kesehatan	47.955.900.000	29.979.800.000
4.	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi	38.624.453.000	48.009.300.000
5.	Kementerian Sosial	2.558.984.000	1,902,233,000
6.	Kementerian Kelautan & Perikanan	23.223.411.000	20.046.049.000
7.	Kementerian Kehutanan	31.383.370.000	32.543.520.000
8.	Pekerjaan Umum	59.973.291.000	76,239,472,000
9.	Kementerian Lingkungan Hidup	-	1.200.000.000
10.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	5.338.610.000	3.919.890.000
11.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	500.000.000	-
<b>Total</b>		<b>365.211.273.000</b>	<b>333.938.642.000</b>

Sumber : Laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013.

### 4. Program Dan Kegiatan yang Diterima Dan Pelaksanaannya

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana Tugas Pembantuan yang diterima SKPD (SKPD) di tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 sebanyak 13 program dan 28 kegiatan mencapai realisasi rata-rata 93,24 %.

Program kegiatan melalui Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, meliputi kegiatan ; Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan; Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :

- Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas serealia seluas 18.000 H.
- Pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan sebanyak 6 Unit.
- Kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana pasca panen tanaman pangan sebanyak 1 Kelompok.

b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, meliputi kegiatan; Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan; Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :

- Pengembangan Kawasan Tanaman Buah seluas 9 Hektar dan Sarana Prasarana Pascapanen sebanyak 242 Unit.
- Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura seluas 0,8 Hektar, Sekolah Lapang GAP sebanyak 2 Kelompok, Pemberdayaan Kelembagaan Usaha sebanyak 1 Lembaga, Sarana Prasarana Budidaya sebanyak 4 Unit, Sarana Prasarana Pascapanen sebanyak 3 Unit.
- Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran seluas 35 Hektar.

c. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, meliputi kegiatan ; Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar; Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim; Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan; Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan; Dukungan Perlindungan Perkebunan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :

- Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar seluas 2 Hektar.
- Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan untuk 1 Kelompok Tani, Pengembangan Kebun Benih Tanaman Tahunan seluas 4 Hektar.
- Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan di 8 Kabupaten, Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan di 13 Kabupaten, Penilaian Usaha Perkebunan di 13 Kabupaten.
- Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Perkebunan untuk 6 Kelompok Tani.

d. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, meliputi kegiatan; Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal; Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal; Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal; Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :

- Pengembangan Kawasan Sapi Potong untuk 25 kelompok peternak.
- Pengembangan Budidaya sapi potong untuk 1 Kelompok peternak, Pengembangan Budidaya Sapi Perah untuk 1 Kelompok peternak, Pengembangan Budidaya Kerbau untuk 1 Kelompok peternak, Penguatan Kelembagaan

Pelayanan Inseminasi (IB) sebanyak 8 Unit, Optimalisasi INKA sebanyak 48 Ekor, Pengembangan Ternak Kambing/Domba sebanyak 4 Kelompok peternak, Pengembangan Budidaya Unggas Lokal untuk 4 Kelompok peternak, Pengembangan Budidaya Babi untuk 2 Kelompok peternak.

- Pengembangan Integrasi Tanaman – Ruminansia untuk 5 Kelompok peternak, Pengembangan Integrasi Ternak Unggas untuk 1 Kelompok peternak, Optimalisasi Sumber Bibit / Benih (HPT) untuk 2 Kelompok peternak, Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Unggas untuk 2 Kelompok peternak, Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Unggas untuk 1 Kelompok peternak.
  - Pembibitan Sapi Potong untuk 3 Kelompok peternak, Pembibitan Kerbau untuk 4 Kelompok peternak, Pembibitan Kambing/Domba untuk 2 Kelompok peternak, Pembibitan Ayam Lokal untuk 1 Kelompok peternak, Pengembangan Perbibitan Sapi di Lokasi PTPN untuk 2 Kelompok peternak, Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting untuk 38 Kelompok peternak.
- e. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian, melalui kegiatan ; Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian ; Pengembangan Pemasaran Domestik ; Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :
- Unit usaha pengolahan hasil perkebunan sebanyak 1 Unit.
  - Optimalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Domestik sebanyak 3 Unit.
  - Unit usaha pengolahan hasil peternakan sebanyak 5 Unit.
  - Optimalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Domestik sebanyak 2 Unit.



- f. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui kegiatan ; Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian ; Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian ; Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :
- Pemberdayaan Kelembagaan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim sebanyak 8 Unit Lembaga.
  - Pengembangan Optimasi Lahan seluas 2300 Hektar.
  - Pengembangan Jalan Pertanian sepanjang 19 Km.
  - Perluasan Areal Holtikultura/Perkebunan/Peternakan seluas 410 Hektar.
  - Pengembangan Jaringan Irigasi seluas 7.770 Hektar, Pemberdayaan Kelembagaan sebanyak 10 Unit Lembaga Irigasi.
  - Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) seluas 400 Hektar.
  - Perluasan sawah seluas 1.100 Hektar.
- g. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan ; Fasilitas Penempatan Transmigrasi, Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi, Penyediaan Tanah Transmigrasi, Partisipasi Masyarakat. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :
- Penempatan transmigran ke Kawasan Transmigrasi di wilayah strategis sebanyak 380 KK)
  - Sarana social yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sebanyak 4 Unit.
- h. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan ; Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi ; Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi. Hasil pelaksanaan program kegiatan

antara lain :

- Lahan Transmigrasi yang tersedia di wilayah strategis seluas 7.000 Hektar.
  - Lembaga Pemerintah yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi di wilayah tertinggal/perbatasan sebanyak 3 Lembaga.
  - Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum Transmigran sebanyak 8 Unit.
  - Lahan Usaha produktif di permukiman/kawasan transmigrasi untuk 112 transmigran.
- i. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, melalui kegiatan ; Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :
- Penyediaan Rumah bagi Warga KAT sebanyak 37 Unit dan Bantuan Jaminan Hidup warga KAT sebanyak 174 KK.
  - Bantuan Peralatan Kerja, Peralatan Rumah Tangga, Bibit Tanaman Keras dan Sertifikasi lahan untuk 37 KK.
- j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan ; Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI). Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :
- Pembangunan Kapal Perikanan 10 - 30 Gt sebanyak 2 Unit.
  - Pembangunan Rumah Ikan sebanyak 1 Unit.
- k. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, melalui kegiatan ; Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan ; Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :
- Produksi induk unggul sebanyak 126.645 Induk, Jumlah

Benih dengan Mutu Terjamin sebanyak 140 Juta Benih.

- Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya seluas 1.000 Hektar, Penyediaan Parasarana dan Sarana yang Memadai di 3 Kawasan budidaya perikanan, pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di 7 Kabupaten dan Kota.
- l. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, melalui kegiatan ; Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :
- Pengembangan 1 Unit Pasar, pengembangan 1 lokasi pengolahan hasil perikanan, pengembangan 1 lokasi produk hasil perikanan nonkonsumsi.
- m. Program Penyelenggaraan Jalan, melalui kegiatan ; Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :
- Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 45,51 Km
  - Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan sepanjang 32,73 Km
  - Pelebaran Jalan sepanjang 3 Km

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan SKPD di tingkat Kabupaten/Kota tahun 2013 sebanyak 18 program dan 36 kegiatan mencapai realisasi rata-rata 75,19 %.

Program kegiatan melalui Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD di tingkat kabupaten/kota antara lain :

- a. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, melalui kegiatan; Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan. Hasil pelaksanaan program kegiatan adalah ; Bangunan Kantor seluas 561 m<sup>2</sup> di Kabupaten

Nunukan ; dan Bangunan Kantor seluas 168 m<sup>2</sup> di Kabupaten Malinau.

- b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, melalui kegiatan ; Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal ; Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan ; Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :
  - Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas sereal seluas 34.600 Hektar di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat
  - Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) / pengembangan budidaya aneka kacang dan umbi seluas 1000 Hektar di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat.
  - Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana pasca panen tanaman pangan sebanyak 3 kelompok tani di Kutai Kartanegara
- c. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, melalui kegiatan ; Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain ; Pengembangan Kawasan Tanaman Buah seluas 100 Hektar; Sekolah Lapang GAP untuk 2 Kelompok; Pemberdayaan Kelembagaan Usaha sebanyak 1 Lembaga; dan Sarana Prasarana Pascapanen sebanyak 312 Unit
- d. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, melalui kegiatan ; Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman

Buah Berkelanjutan. Hasil pelaksanaan program kegiatan Antara lain :

- Pengembangan Kawasan Tanaman Buah seluas 285 Hektar di Kabupaten Berau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Kutai Timur.
  - Sekolah Lapang GAP untuk 5 Kelompok di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Tarakan.
  - Pemberdayaan Kelembagaan Usaha sebanyak 2 Lembaga di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Kutai Timur.
  - Sarana Prasarana Pascapanen sebanyak 505 Unit di Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Kabupaten Kutai Timur.
  - Sarana Prasarana Budidaya sebanyak 3 Unit di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.
  - Pengembangan Kawasan Tanaman Obat seluas 40 Hektar di Nunukan.
  - Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura 0,2 Hektar di Kota Tarakan.
  - Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat sebanyak 51 Unit di Kota Tarakan.
  - Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran seluas 45 Hektar di Kota Tarakan.
- e. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, melalui kegiatan ; Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan; Dukungan Perlindungan Perkebunan; Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar; Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan; Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan; Dukungan Perlindungan Perkebunan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :

- Pengembangan Tanaman Karet seluas 300 Hektar di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan untuk 1 Kelompok Tani di Kabupaten Penajam Paser Utara.
  - SL-PHT Perkebunan untuk 4 Kelompok Tani di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara .
  - Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan seluas 75 Hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara.
  - Pengembangan Tanaman Lada seluas 2 Hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan untuk 2 Kelompok Tani di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- f. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui kegiatan ; Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian ; Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian ; Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Hasil pelaksanaan program kegiatan Antara lain :
- Pengembangan Jaringan Irigasi seluas 4.815 Hektar di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Berau.
  - Pemberdayaan Kelembagaan sebanyak 3 Unit di Kabupaten Berau dan Kabupaten Nunukan.
  - Pengembangan Optimasi Lahan seluas 860 Hektar di Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan .
  - Perluasan sawah seluas 650 Hektar di Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan.
  - Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) seluas

200 Hektar di Kabupaten Nunukan.

- g. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, melalui kegiatan ; Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Hasil pelaksanaan program kegiatan adalah BAntuan Operasional Pelayanan Kesehatan di 14 Kabupaten/Kota untuk 244 Puskesmas.
- h. Program Pembinaan Upaya Kesehatan melalui kegiatan ; Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu Ambulance dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar di Berau
- i. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja. Hasil pelaksanaan program kegiatan adalah terserapnya pengangguran sebanyak 2.200 orang yang dipekerjakan sementara pada kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Tarakan
- j. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi melalui kegiatan Fasilitas Penempatan Transmigrasi ; Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi ; Penyediaan Tanah Transmigrasi ; Partisipasi Masyarakat. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :
  - Penempatan transmigran dari luar daerah di wilayah strategis sebanyak 480 KK dan transmigran local sebanyak 1.350 KK di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan
  - Permukiman yang dibangun sebanyak 398 Unit di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan.
  - Prasarana Jalan yang dibangun seluas 26,40 Km di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan.

- Penyediaan lahan transmigrasi di wilayah tertinggal/perbatasan seluas 1.040 Hektar di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan.
  - Lembaga Pemerintah yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi di wilayah tertinggal/perbatasan sebanyak 2 Lembaga di Kabupaten Bulungan.
- k. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi melalui kegiatan ; Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi ; Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi ; Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :
- Pengembangan Jalan sepanjang 3 Km di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan.
  - Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum sebanyak 8 Unit di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan.
  - Pengembangan Lahan Usaha produktif transmigrasi seluas 259 Hektar di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Kutai Timur.
  - Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi sebanyak 1.500 KK di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan.
  - Pengembangan Jenis Usaha Pengolahan hasil sebanyak 5 Jenis di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai Timur.
  - Bantuan Pendidikan, Pelayanan Sosial Budaya dan Mental spiritual sebanyak 2.404 Orang di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Tana Tidung.
  - Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang



mandiri sebanyak 17 Lembaga di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.

- Bantuan Pangan transmigran sebanyak 650 KK di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan.
  - Bantuan Kesehatan kepada transmigran sebanyak 1.950 Orang di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Kutai Timur.
  - Pengembangan Kewirausahaan sebanyak 30 Orang di Kabupaten Kutai Timur.
- l. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan, melalui kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan. Hasil pelaksanaan program kegiatan adalah Area Demonstrasi REDD di kabupaten Berau dan Kabupaten Malinau.
- m. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan ; Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu Penyediaan Kapal Perikanan 10 - 30 Gt sebanyak 2 Unit di Kabupaten Kutai Timur.
- n. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, melalui kegiatan ; Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan; Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan; Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :
- Jenis Penyakit Ikan Penting yang Dapat Dikendalikan sebanyak 50 Jenis.
  - Jumlah Benih dengan Mutu Terjamin sebanyak 70 Juta

Benih.

- Luas Lahan yang disediakan untuk Produksi Perikanan Budidaya seluas 10 Hektar sebagai Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- o. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, melalui kegiatan ; Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain :
- Pembudidaya yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya sebanyak 10 Kelompok di Kabupaten Penajam Paser Utara
  - Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan sebanyak 10 Kelompok di Kabupaten Penajam Paser Utara
- p. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, melalui kegiatan ; Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan, Hasil pelaksanaan program kegiatan Pengembangan Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Berau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Kutai Timur
- q. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, melalui kegiatan ; Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Hasil pelaksanaan program kegiatan adalah Rehabilitasi Lahan Ekosistem Rusak di Kota Bontang.
- r. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, melalui kegiatan ; Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat ; Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan. Hasil pelaksanaan program kegiatan adalah Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Perbatasan di Kabupaten Nunukan.

## **5. Permasalahan Dan Solusi**

### **a. Permasalahan :**

- 1) Keterlambatan pelaksanaan program kegiatan yang disebabkan oleh terlambatnya penerbitan Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, adanya proses revisi DIPA yang berulang kali sehingga memperlambat pencairan anggaran, pergantian PPK, KPA dan bendaharawan karena mutasi,
- 2) Belum efektifnya pelaksanaan pembangunan bidang pertanian di lapangan yang disebabkan antara lain; bantuan program kegiatan yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan daerah; adanya perubahan status kepemilikan lahan di daerah Kabupaten/Kota; perubahan lokasi kegiatan; standarisasi harga (unit cost) yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga riil di daerah; Keterbatasan petugas lapangan di daerah; keterbatasan tenaga kerja pertanian; keterlambatan pemberian bantuan bibit yang tidak sesuai dengan jadwal musim tanam di daerah, curah hujan tinggi menyebabkan lahan tergenang air.
- 3) pembangunan infrastruktur masih dihadapkan pada permasalahan, diantaranya: (1) hambatan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang sangat kompleks, seperti lambatnya proses penerbitan izin penggunaan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, permintaan ganti rugi lahan yang sulit dipenuhi oleh peraturan perundangan sampai penolakan dari warga masyarakat yang mengarah pada permasalahan sosial; (2) lemahnya koordinasi dan sinergi lintas sektor yang berakibat pada kurang terintegrasinya pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien;

**b. Solusi :**

- 1) Peningkatan advokasi dan sosialisasi terhadap keseluruhan sasaran program-kegiatan yang dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan.
- 2) penyempurnaan proses penyelarasan target dan sasaran program, dan penentuan lokasi kegiatan melalui koordinasi intensif baik antara pihak/instansi yang berkepentingan ditambah dengan penyelarasan sasaran program
- 3) meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan melalui persiapan yang matang baik dalam aspek teknis maupun aspek sosial-kemasyarakatan agar setiap potensi hambatan yang terjadi dapat segera diketahui dan segera dirumuskan rekomendasi penyelesaiannya sehingga tidak menghambat pelaksanaan konstruksi. Selain itu upaya peningkatan koordinasi dan partisipasi *stakeholder* terkait baik dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun unsur warga masyarakat dalam pembebasan lahan.
- 4) Mekanisme pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diatur oleh pusat perlu ditinjau ulang dan dikoordinasikan sedini mungkin sebelum APBN ditetapkan.
- 5) Perencanaan yang dilakukan oleh kementerian agar memperhatikan usulan kebutuhan dari daerah. Penetapan Lokasi oleh kementerian harus dilakukan kordinasi dan survey terlebih dahulu di kabupaten/kota sebelum ditetapkan dalam RKP atau Renja Kementerian.
- 6) Optimalisasi tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 7) Memperkuat komitmen Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program/kegiatan melalui Tugas Pembantuan.

## **B. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota melalui Bantuan Keuangan Provinsi**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar hukum atau peraturan yang digunakan secara umum dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan Provinsi, adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- c. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- d. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2013 Tentang tata cara pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

### **2. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Pada Tahun 2013 Kalimantan Timur mengalokasikan Dana bantuan keuangan kepada Kabupaten dan Kota sebesar Rp 2,253 Trilyun. Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota ditujukan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan Provinsi

Kalimantan Timur meliputi Infrastruktur, Ekonomi, Pengembangan Sumber daya Manusia, Pemerintahan dan Aparatur.

Tabel 5.3 Rekapitulasi Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013

No.	Alokasi Anggaran berdasarkan Fungsi				Jumlah
	Infrastruktur	Ekonomi	Pengembangan SDM	Pemerintahan Aparatur	
1	<b>Kota Samarinda</b>				
	275.840.000.000	9.882.000.000	139.317.200.000	4.411.000.000	429.450.200.000
2	<b>Kota Balikpapan</b>				
	59.500.000.000	11.252.000.000	167.175.800.000	1.631.000.000	239.558.800.000
3	<b>Kota Tarakan</b>				
	30.000.000.000	9.076.500.000	62.926.300.000	1.007.500.000	103.010.300.000
4	<b>Kota Bontang</b>				
	39.895.000.000	4.672.000.000	40.959.600.000	1.006.000.000	86.532.600.000
5	<b>Kabupaten Kutai Kartanegara</b>				
	25.000.000.000	16.118.000.000	125.666.200.000	2.255.000.000	169.039.200.000
6	<b>Kabupaten Paser</b>				
	138.500.000.000	20.665.000.000	97.846.500.000	1.385.000.000	258.396.500.000
7	<b>Kabupaten Berau</b>				
	17.000.000.000	12.174.000.000	51.056.000.000	1.283.000.000	81.513.000.000
8	<b>Kabupaten Bulungan</b>				
	99.412.000.000	12.498.000.000	47.223.100.000	1.127.000.000	160.260.100.000
9	<b>Kabupaten Kutai Timur</b>				
	36.000.000.000	26.478.000.000	59.255.000.000	1.415.000.000	123.148.000.000
10	<b>Kabupaten Kutai Barat</b>				
	138.900.000.000	19.522.000.000	50.693.600.000	1.316.000.000	210.431.600.000
11	<b>Kabupaten Nunukan</b>				
	46.000.000.000	14.812.000.000	47.204.400.000	1.445.000.000	109.461.400.000
12	<b>Kabupaten Malinau</b>				
	62.100.000.000	19.758.000.000	31.872.500.000	1.125.000.000	114.855.500.000
13	<b>Kabupaten Penajam Paser Utara</b>				
	31.800.000.000	21.194.000.000	44.360.300.000	1.125.000.000	98.479.300.000
14	<b>Kabupaten Tana Tidung</b>				
	22.000.000.000	14.000.000.000	32.094.000.000	863.000.000	68.957.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.021.947.000.000</b>	<b>212.101.500.000</b>	<b>997.650.500.000</b>	<b>21.394.500.000</b>	<b>2.253.093.500.000</b>

Sumber : Laporan Kab/Kota yang melakukan Program/Kegiatan dari Dana Bankeu Tahun 2013.

#### a. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh SKPD di tingkat Kabupaten/Kota tahun 2013 meliputi .. program dan .. kegiatan dengan capaian realisasi penyaluran

bantuan keuangan rata-rata 91,36 %.

Beberapa program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota melalui dukungan dana Bantuan Keuangan Provinsi adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan Infrastruktur antara lain :

- Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan alokasi dana sebesar Rp 230,35 Milyar di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
- Pengelolaan Jaringan Irigasi Kota, Rawa Dan Jaringan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp 89,55 Milyar di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.
- Peningkatan Prasarana Pengaman Pantai dengan alokasi dana sebesar Rp 5 Milyar di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Permukiman dengan alokasi dana sebesar Rp 89,79 Milyar di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.
- Pengamanan Penerbangan Sipil dengan alokasi dana sebesar Rp 3 Milyar di Kabupaten Malinau.
- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga dengan alokasi dana sebesar Rp 2 Milyar di Kabupaten Kutai Barat.
- Peningkatan Pelabuhan dengan alokasi dana sebesar Rp 5 Milyar di Kabupaten Kutai Timur.

- Pengembangan KIPM Maloy (pembebasan lahan) dengan alokasi dana sebesar Rp 10 Milyar di Kabupaten Kutai Timur.
  - Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah dengan alokasi dana sebesar Rp 23 Milyar di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.
  - Pengendalian Banjir dengan alokasi dana sebesar Rp 95.85 Milyar di Kabupaten Bulungan, Kota Bontang Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.
  - Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas ASDP dengan alokasi dana sebesar Rp 13 Milyar di Kabupaten Berau.
  - Peningkatan Pelayanan Angkutan di dengan alokasi dana sebesar Rp 26 Milyar Kabupaten Paser dan Kota Balikpapan.
  - Peningkatan Jalan Dan Jembatan dengan alokasi dana sebesar Rp 35,6 Milyar di 13 Kabupaten/Kota.
  - Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan dengan alokasi dana sebesar Rp 4,35 Milyar di Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang dan Kota Samarinda.
  - Pembangunan Infrastruktur dengan alokasi dana sebesar Rp 49,5 Milyar di Kabupaten Paser.
  - Pembangunan Prasarana Angkutan Udara dengan alokasi dana sebesar Rp 6,5 Milyar di Kabupaten Kutai Barat.
- 2) Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain :
- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp 111 Milyar di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.



- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Permukiman dengan alokasi dana sebesar Rp 30,75 Milyar di 14 Kabupaten/Kota.
- Pendidikan Menengah dengan alokasi dana sebesar Rp 38,4 Milyar di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.
- Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan alokasi dana sebesar Rp 114,1 Milyar di 14 Kabupaten/Kota.
- Pendidikan Anak Usia Dini dengan alokasi dana sebesar Rp 56,1 Milyar di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.
- Pendidikan Dasar dengan alokasi dana sebesar Rp 335,8 Milyar di 14 Kabupaten/Kota.
- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga dengan alokasi dana sebesar Rp 60 Milyar di 14 Kabupaten/Kota.
- Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas dengan alokasi dana sebesar Rp 3,75 Milyar di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.
- Perbaikan Gizi Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp 245,6 Milyar di 14 Kabupaten/Kota.
- Kapasitas dan SDM Penyuluh dengan alokasi dana sebesar Rp 1,65 Milyar di 13 Kabupaten/Kota.

- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Sosial dengan alokasi dana sebesar Rp 0,5 Milyar di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung Kabupaten/Kota.

3) Pembangunan Ekonomi antara lain :

- Peningkatan Sarana Prasarana Kelistrikan dengan alokasi dana sebesar Rp 91 Milyar di Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang dan Kota Samarinda
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan alokasi dana sebesar Rp 0,75 Milyar di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.
- Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp 0,8 Milyar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Nunukan.
- Pengembangan Kewirausahaan dengan alokasi dana sebesar Rp 0,75 Milyar di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.
- Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dengan alokasi dana sebesar Rp 1,2 Milyar di Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang dan Kota Samarinda
- Peningkatan Kapasitas dan SDM Penyuluh dengan alokasi dana sebesar Rp 12 Milyar di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana
- Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya dengan alokasi dana

sebesar Rp 11 Milyar di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau,

- Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dengan alokasi dana sebesar Rp 26 Milyar di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.
- Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan dengan alokasi dana sebesar Rp 0,75 Milyar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Nunukan.
- Produksi Hasil Peternakan dengan alokasi dana sebesar Rp 8,4 Milyar di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.
- Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perikanan dengan alokasi dana sebesar Rp 14,1 Milyar di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau.
- Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 6,1 Milyar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.
- Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan dengan alokasi dana sebesar Rp 5,8 Milyar di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau.
- Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah dengan alokasi dana sebesar Rp 3,5 Milyar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.
- Diversifikasi Bahan Bakar dengan alokasi dana sebesar Rp 3,75 Milyar di Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang dan Kota Samarinda

- Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata dengan alokasi dana sebesar Rp 5,6 Milyar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Nunukan,
  - Peningkatan Produksi Peternakan dengan alokasi dana sebesar Rp 11,1 Milyar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.
  - Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dengan alokasi dana sebesar Rp 0,51 Milyar di Kabupaten Berau.
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dengan alokasi dana sebesar Rp 6 Milyar di Kabupaten Tarakan dan Kabupaten Berau.
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Peningkatan Kapasitas dan SDM Penyuluh dengan alokasi dana sebesar Rp 1 Milyar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat.
  - Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian dengan alokasi dana sebesar Rp 2 Milyar di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4) Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur antara lain :
- Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp 213,95 Milyar di 14 Kabupaten/Kota.